

# **ANALISIS PERBEDAAN DASAR PERHITUNGAN TARIF HARGA AIR BERSIH DAN PENGELOLAAN DANA PAMDES DI BUMDES BHUANA UTAMA**

**(Studi Pada BUMDes Bhuana Utama Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)**

**<sup>1</sup>Gede Fanny Wahyu Anugrah, <sup>1</sup>I Nyoman Putra Yasa, <sup>2</sup>Edy Sujana**

Program Studi S1 Akuntansi  
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: { [1wahyuanugrah16@gmail.com](mailto:1wahyuanugrah16@gmail.com), [1putrayasainym@undiksha.ac.id](mailto:1putrayasainym@undiksha.ac.id),  
[2ediesujana\\_bali@yahoo.com](mailto:2ediesujana_bali@yahoo.com) }

## **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana pamdes dengan perbedaan tarif air bersih terhadap penduduk lokal dan pendatang di bumdes panji. Perbedaan tarif ini terdapat pada SOP BUMDes Bhuana Utama dengan beberapa kategori yaitu rumah tangga A, rumah tangga B, dan usaha/villa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan perbedaan tarif air antara penduduk lokal dan pendatang oleh BUMDes dilakukan dengan kebijakan tersendiri dan dasar perhitungan untuk menentukan tarif berdasarkan hasil musyawarah pemerintah desa dan tokoh masyarakat sesuai harga pasar yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa dan penentuannya menggunakan tarif kesepakatan yaitu tarif harga air pada kategori rumah tangga A Rp. 2.500, rumah tangga B Rp 5.000, usaha/villa Rp 5.000.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana, Tarif, BUMDes

## **Abstract**

*The purpose of this study was to find out the management of the Pamdes (a drinking water interprice managed by a village) funds with a difference in rate for clean water to local residents and migrants at Bumdes (An own village Interprice) Panji. This difference in rate was found on the SOP BUMDes Bhuana Utama with several categories, namely household category A, household category B, and business / villa. This research was a qualitative research. The data used were primary and secondary data obtained through in-depth interview, observation, document study, and literature study. The data analysis technique used was qualitative which was carried out interactively and took place continuously.*

*The results showed that the application of a difference in water rate between local residents and migrants by BUMDes was carried out with separate policies and the basis for calculating the rate was based on the results of village government meetings and community leaders according to market prices ratified by the Village Head Decree and the determination used agreement rates namely price rates water in household category A Rp. 2,500, household category B Rp 5,000, business / villa Rp 5,000.*

**Keywords:** Fund Management, Tariffs, BUMDes

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah Provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Pusat tentu akan kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas dan terbagi-bagi atas beberapa wilayah. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Otonomi Daerah dengan memberi kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk membangun, dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut. Salah satu bagian wilayah yang diterapkan otonomi daerah adalah wilayah desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Indonesia (Pasal 1 ayat 12 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah). Penduduk desa pada umumnya saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya dan pemerintah Desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai agen terdepan untuk memajukan ekonomi Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Saragi (dalam Badriyadi, 2012) menyebutkan ada 4 tujuan pembentukan BUMDes antara lain *pertama*, pengembangan usaha dalam rangka pengentasan kemiskinan. *Kedua*, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat. *Ketiga*, penyedia jaminan sosial. *Keempat*, penyedia layanan bagi masyarakat desa.

Salah satu BUMDes yang memiliki usaha berkaitan dengan kebutuhan dan potensi desa yaitu BUMDes Bhuana Utama Desa Panji. BUMDes ini memiliki usaha dalam mengelola air bersih yang bersumber dari mata air desa yang disebut PAMDes. PAMDes merupakan unit usaha yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat yang bertujuan mensejahterakan warga Desa.

Pengelolaan PAMDes oleh BUMDes dibutuhkan masyarakat Desa Panji untuk menjawab berbagai permasalahan pada pengelolaan terdahulu, sehingga mampu mengoptimalkan hasil demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penentuan tarif yang diterapkan oleh BUMDes ini berbeda dengan penentuan tarif pada umumnya. Perbedaan itu berdasarkan domisili penduduk yang ada di Desa Panji. Tentunya, penduduk yang menempati suatu Desa tidak mutlak berasal dari penduduk asli dari Desa tersebut. Terlebih lagi adanya kemajuan pembangunan menyebabkan banyaknya penduduk melakukan perpindahan tempat

tinggal. Sama halnya yang terjadi di Desa Panji tentu ada yang namanya penduduk lokal yang berasal dari penduduk asli Desa Panji dan penduduk pendatang yang berasal dari penduduk diluar Desa Panji yang bertempat tinggal di Desa Panji. Atas pertimbangan tersebut, pengenaan tarif air dibedakan antara penduduk lokal Rp. 150 - 1000 / m<sup>3</sup> dan pendatang Rp. 500 – Rp. 2.500 / m<sup>3</sup>.

Menurut Tambunan (2011:328) tarif adalah salah satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional. Selanjutnya menurut Aliminsyah, dkk dalam buku Kamus Istilah Akuntansi (2013:290-291) mendefinisikan tarif sebagai pengaturan yang sistematis dari bea yang dipungut atas barang dan jasa yang melewati batas-batas Negara.

Deskripsi interpretasi pada kebutuhan air yang sangat tinggi dari masyarakat Desa Panji yang mengharuskan BUMDes melakukan pengelolaan air bersih PAMDes dengan baik. Di Desa Panji terdapat 2 masyarakat yang berbeda antara lokal dan pendatang, yang membuat BUMDes panji membedakan tarif antara lokal dan pendatang berdasarkan SOP BUMDes Bhuana Utama yang nantinya diharapkan tidak adanya kecemburuan sosial dari warga lokal yang lebih dahulu mencari dan mengetahui sumber air dari PAMDes tersebut. Pada penelitian ini mengulas tentang perbedaan harga tarif air dari PAMDes Desa Panji. Segala informasi maupun data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara secara mendalam kepada kepala BUMDes sebagai informan yang bertempat di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Pembayaran terkait dengan PAMDes ini langsung dilakukan secara langsung oleh penduduk ke BUMDes. pengelolaan Dana yang masuk ke BUMDes digunakan kembali ke Desa yaitu seperti penggunaan dana oleh desa adat dan masing-masing banjar. Selama pengelolaan PAMDes oleh

BUMDes, pencapaian tujuan PAMDes untuk mensejahterakan masyarakat desa lebih optimal.

Pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurus atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen, karena pengelolaan dalam sebuah organisasi memerlukan pelaksanaan tanggung jawab manajerial secara terus menerus dan tanggung jawab tersebut secara kolektif sering disebut sebagai fungsi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Terry, 2005).

*Agency Theory* (teori keagenan) merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota perusahaan yakni antara principal (pemilik) dan agent (agen) sebagai pelaku utama. Pemilik merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama pemilik, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi mandat oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan. Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut Jensen and Meckling dalam (Susanti dan Mildawati, 2014). Dalam konteks ini yang menjadi principal adalah kepala desa selaku pemilik sumber kekayaan yang ada didesa yang merupakan pihak yang memberikan mandat kepada Agent yaitu BUMDes selaku pelaksana kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui sebelumnya. Dalam memberikan mandat untuk mengelola tarif air bersih berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh BUMDes Panji yang diawasi langsung dari pihak Desa untuk penentuan

perbedaan tarif antara penduduk pendatang dan lokal ini telah diatur didalam SOP.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang diterapkannya perbedaan tarif air bersih antara penduduk lokal maupun pendatang dan mengetahui implikasi pengelolaan dana PAMDes dengan perbedaan tarif antara penduduk lokal dan pendatang oleh BUMDes Bhuana Utama terhadap kontribusi pembangunan Desa Panji sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh BUMDes Panji.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap fenomena dan observasi langsung ke lapangan serta mengumpulkan data-data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Sugiyono (2009:225) menyatakan bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangularisasi. Dalam penelitian ini secara garis besar menggunakan empat teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, studi dokumen, dan studi kepustakaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori data yaitu: 1) Data primer Menurut Hasan (2002:82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka,

literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan.

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Semua rangkaian itu merupakan suatu kegiatan yang berkaitan. Moleong (2004), mengemukakan teknik analisis interaktif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1)Reduksi data (*data reduction*), 2)Penyajian data (*data display*), 3)Penarikan kesimpulan (verifikasi).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Pada BUMDes kita mengenal berbagai institusi sosial dan institusi keuangan mikro yang dibentuk pemerintah seperti BKD, KCK, BUUD, KUD, UEDPS, LPD di Bali sejak 1985 (Sutoro, 2013). Khusus pada Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, terdapat salah satu BUMDes yang berdiri sejak tahun 2016. Nama BUMDes tersebut adalah Bhuana Utama. Segala bentuk administrasi dalam pembentukan BUMDes di Desa Panji telah berpedoman dengan peraturan pemerintah daerah hingga peraturan Menteri serta keberadaan BUMDes ini didukung oleh bukti dari PERDES No. 9 Tahun 2016.

BUMDes Bhuana Utama memiliki keunikan dari BUMDes-BUMDes yang ada di seluruh Kabupaten Buleleng yakni perbedaan penggunaan Air Bersih terhadap penduduk Lokal dan Pendatang hal yang melatar belakangi perbedaan tersebut yakni berdasarkan sejarah yang ada pada Desa Panji dimana pada zaman dahulu kala Masyarakat di Desa Panji bergotong royong untuk mendapatkan Air Bersih yang berada pada daratan tinggi/Bukit di Desa Panji dengan saling membantu dalam pemasangan Pipa sampai teralirnya Air Bersih ke setiap rumah masyarakat Desa Panji, namun ketika ada proyek atau para pengembang datang untuk tinggal di Desa Panji sekaligus banyak perumahan-perumahan yang ada di Desa Panji menjadikan masyarakat merasa kekurangan Air Bersih yang mengalir ke warga setempat sehingga terdapat kesenjangan sosial yang menjadikan perbedaan Tarif Air Bersih dibedakan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Bhuana Utama yakni bapak Edy Susena menyatakan bahwa,

“Dulu itu ketika mengambil sumber air dari atas perbukitan Desa Panji itu memang masyarakat desa panji yang mengambil sendiri langsung, masyarakat di Desa panji dulu sampai menjual sapi untuk membeli pipa untuk pembuatan pipa secara gotong royong. Pembedanya itu dibedakan antara lokal dengan pendatang tapi bukan keseluruhan orang pendatang tapi pengembang seperti contohnya jika masyarakat asli desa panji tinggal diperumahan di desa panji maka dikenakan tarif air pengembang bukan tarif air lokal, masyarakat itu membayar berbeda dengan masyarakat pendatang dan juga tarif itu berdasarkan Kawasan tarif A dan tarif B berdasarkan kemampuan dari masyarakat masing-masing serta perbedaan tarif air tersebut dilihat dari sisi sejarah dari Desa Panji ini”

Hal tersebut membuat kesenjangan sosial tetapi dengan adanya perbedaan Tarif Air

Bersih maka kesepakatan itu mufakat antara masyarakat lokal dan pendatang. Hasil wawancara dibuktikan juga dari pernyataan warga lokal desa panji yakni Bapak Gusti Nyoman Darma Santi dari Banjar Dina Dangin Pura yang menyatakan bahwa,

“iya, karena yang menjadikan pembeda pada tarif air bersih ini adalah sejarah masyarakat Desa Panji dahulu dimana masyarakat desa panji dulu membangun sendiri pipa-pipa yang dialirkan pada rumah-rumah agar mendapatkan air bersih, dan ketika pengembang datang atau yang membuat perumahan di desa panji warga memiliki kesenjangan sosial terhadap warga perumahan tersebut sehingga dengan adanya putusan dari pemerintah desa dibedakan lah tarif air tersebut agar pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Panji semakin berkembang ke depannya”

*Agency Theory* (teori keagenan) merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota perusahaan yakni antara principal (pemilik) dan agent (agen) sebagai pelaku utama. Pemilik merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama pemilik, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi mandat oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan. Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut Jensen and Meckling dalam (Susanti dan Mildawati, 2014). Pihak prinsipal adalah pemegang saham dan yang sebagai agennya adalah pihak manajemen dari perusahaan.

Dalam perusahaan, hubungan antara principal dan agent diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham berperan sebagai principal sementara manajer berperan sebagai agent. Hubungan ini

menimbulkan suatu kontrak antara pemegang saham dan manajer. Hubungan kontrak ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) antaran pemegang saham dan manajer (Ross, Westerfield, Jaffe, 2012 : 13). Manajer sebagai pihak yang mengelola kegiatan perusahaan sehari-hari memiliki lebih banyak informasi internal dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna informasi eksternal terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Setyaningrum, 2013).

Dalam konteks ini yang menjadi principal adalah kepala desa selaku pemilik sumber kekayaan yang ada didesa yang merupakan pihak yang memberikan mandat kepada Agent yaitu BUMDes selaku pelaksana kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui sebelumnya. Dalam memberikan mandat untuk mengelola tarif air bersih berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh BUMDes Panji yang diawasi langsung dari pihak Desa untuk penentuan perbedaan tarif antara penduduk pendatang dan lokal ini telah diatur didalam SOP

PAMDes merupakan bentuk pelayanan air minum perdesaan yang dikelola secara mandiri dengan swadaya masyarakat pada BUMDesa Bhuana Utama di Desa Panji. PAMDes di Desa Panji merupakan Pengelolaan Air Bersih bagian dari unit usaha BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDesa Bhuana Utama memiliki kebijakan tersendiri dan dasar perhitungan untuk menentukan tarif yang didasarkan pada hasil musyawarah pemerintah desa dan tokoh masyarakat sesuai harga pasar yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa. Berikut

perhitungan tarif pelanggan penduduk lokal dan pendatang di Desa Panji:

#### **Perhitungan Tarif Pelanggan.**

##### **Uang Beban**

- a. Rumah Tangga A (warga lokal) Rp. 2.500
- b. Rumah Tangga B (BTN, Ruko, Pendatang yang tinggal di permukiman lokas, kavlingan) Rp. 5.000
- c. Usaha, Villa (Air isi ulang, cuci motor/mobil, perkebunan/sawah/tegalan dan produksi bahan bangunan batako/cor beton) Rp. 5.000
- d. Tempat sosial (Kanor Desa, Balai Banjar, Khayangan tiga/Pura Milik Desa Pakraman Panji, Setra/kuburan dan Pura Subak)

##### **Tarif Air Per Meter Kubik (m3)**

- a. Rumah Tangga A
  1. 0 m3 sampai dengan 10 m3 Rp 250
  2. 11m3 sampai dengan 25m3 Rp 500
  3. 26 m3 ke atas Rp 1000
- b. Rumah Tangga B
  1. 0 m3 sampai dengan 10 m3 Rp. 500
  2. 11 m3 sampai dengan 25 m3 Rp. 1000
  3. 26 m3 ke atas Rp 2.500
- c. Usaha, Villa
  1. 0 m3 sampai dengan 10 m3 Rp 500
  2. 11 m3 sampai dengan 25 m3 Rp 1.500
  3. 26 m2 Ke Atas Rp. 3000
- d. Tempat Sosial
  1. 0 m3 sampai dengan 10 m3 Rp 0
  2. 60 m3 ke Atas Rp 500
- e. Tarif Progresif \*Water Meter rusak akan dihitung pemakaian 60m3\*
  1. 0 m3 sampai dengan 15 m3 Rp 1000
  2. 11 m3 sampai dengan 25 m3 Rp 2000
  3. 26 m3 ke Atas Rp 3000

### **Perhitungan Tarif Air Untuk Rumah Tangga A&B:**

Perhitungan tarif dengan menggunakan **tarif Kesepakatan. Tarif Kesepakatan** adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMDEs dan pelanggan. Dalam menentukan kesepakatan, diperlukan komunikasi berdasarkan kesukarelaan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

- a. Rumah Tangga A (Penduduk Lokal)  
Tarif = Biaya Pemasangan Awal : m<sup>3</sup>  
= Rp 2.500.000 : Rp 1.000  
= Rp 2.500
- b. Rumah Tangga B (Penduduk Pendetang)  
Tarif = Biaya Pemasangan Awal : m<sup>3</sup>  
= Rp 5.000.000 : Rp 1.000  
= Rp 5.000

Sumber dana dari Pamdes berasal dari pendapatan pengenaan tarif ke masyarakat. Pengenaan dasar tarif dibagi menjadi 2 yaitu penduduk lokal dikenakan uang beban sebesar Rp 2.500 per m<sup>3</sup> sedangkan penduduk pendatang dikenakan uang beban sebesar Rp 5.000 per m<sup>3</sup>.

Implikasi dilakukannya penelitian mengenai pengelolaan dana PAMDes dengan Perbedaan Tarif Air Bersih terhadap penduduk lokal dan pendatang di BUMDesa Bhuana Utama adalah dapat dijadikan suatu parameter dalam pertimbangan ataupun pengambilan keputusan bagi stakeholder pada pengelolaan air bersih di desa panji. Penelitian ini menemukan bahwa terkait dengan pengelolaan air bersih yang diterapkan menjadi pembeda antara penduduk lokal dan pendatang itu dilihat karena adanya sejarah dari masyarakat di Desa Panji yang dahulu masyarakat yang membangun pipa-pipa untuk mengalirkan air bersih ke rumah-rumah dan ketika para pengembang datang atau membangun perumahan di Desa Panji maka dibedakanlah suatu Tarif Air Bersih yang diputuskan dari pemerintah Desa. Penelitian ini berdampak positif jika banyak BUMDes-BUMDes di kabupaten Buleleng menerapkan sistem pembeda Tarif Air bersih terhadap penduduk lokal dan pendatang

karena dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah setempat agar lebih berkembang dan maju.

BUMDes Bhuana Utama Memiliki **Standar Operasional Prosedur** pada pemasangan Air Bersih disetiap rumah yakni sebagai berikut: Persyaratan menjadi Pelanggan, 1) Mengisi formulir pendaftaran yang ada dikantor BUMDesa. 2) Menyerahkan Fotocopy KTP untuk penduduk asli Panji dan surat rekomendasi pengamprahan air dari perbekel Panji bagi penduduk pendatang yang sudah di legalisir. 3) Surat bukti kepemilikan tanah bagi pengajuan amprahan penduduk lokal berlokasi di tanah kavling. 4) Untuk usaha melampirkan fotocopy surat izin usaha dari desa.

### **Membayar untuk menjadi pelanggan sebagai berikut:**

- a. Penduduk asli (lokal) Dan Kavlingan orang lokal Rp. 1.000.000,00
- b. BTN, Ruko dan Kavlingan pengembang Rp 2.500.000,00
- c. Usaha dan Villa Rp. 5.000.000,00.  
\*kategori jenis usaha yang bahan utamanya air\* Air isi Ulang, Kolam renang, perkebunan/sawah/tegalan dan produksi bahan bangunan batako dan cor beton, laundry, dan Cuci motor.
- d. Pemasangan air ditempa sosial tidak dikenakan biaya amprah namun biaya alat dan bahan ditanggung pihak penanggung jawab.

### **PENUTUP**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes Bhuana Utama ini memiliki usaha dalam mengelola air bersih yang bersumber dari mata air desa yang disebut PAMDes. PAMDes merupakan unit usaha yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi

masyarakat yang bertujuan mensejahterakan warga Desa. PAMDes ini sendiri merupakan program yang dicanangkan oleh Bapedda yang bertujuan untuk pemerataan terkait pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat terutama pada wilayah pedesaan. Pengelolaan PAMDes akan dilakukan oleh BUMDes yang ada di Desa terkait.

Penentuan tarif PAMDes yang diterapkan oleh BUMDes ini berbeda dengan penentuan tarif pada umumnya. Perbedaan itu berdasarkan domisili penduduk yang ada di Desa Panji. Tentunya, penduduk yang menempati suatu Desa tidak mutlak berasal dari penduduk asli dari Desa tersebut. Terlebih lagi adanya kemajuan pembangunan menyebabkan banyaknya penduduk melakukan perpindahan tempat tinggal. Sama halnya yang terjadi di Desa Panji tentu ada yang namanya penduduk lokal yang berasal dari penduduk asli Desa Panji dan penduduk pendatang yang berasal dari penduduk diluar Desa Panji yang bertempat tinggal di Desa Panji. Atas pertimbangan tersebut, pengenaan tarif air dibagi menjadi 2 yaitu tarif penduduk lokal sebesar Rp 150 sampai Rp 1.000 /m<sup>3</sup> dan pendatang sebesar Rp 500 sampai – Rp 2.500 /m<sup>3</sup>.

Tujuan dari penelitian ini adalah memberi pengetahuan terkait beberapa hal seperti: (1) untuk mengetahui pengelolaan dana dan perbedaan tarif masyarakat Desa Panji dengan perbedaan biaya tarif lokal dan pendatang. Perbedaan tarif ini terdapat pada SOP BUMDes Bhuana Utama dengan beberapa kategori yaitu rumah tangga A, rumah Tangga B, dan usaha/villa, (2) untuk mengetahui latar belakang dari proses adanya perbedaan tarif air yang berbeda dengan beberapa kajian yang dilakukan oleh pihak desa, (3) untuk mengetahui bagaimana PAMDes Desa Panji dikelola baik dari prosedur pemasangan air, kerusakan, maupun keluhan warga dari pelayanan air bersih yang harus sesuai dengan pembayaran.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan

bagi pengembangan teori mengenai Pengelolaan Dana PAMDes yang dikelola oleh BUMDes dengan Perbedaan Tarif Penduduk Lokal dan Pendatang. Selain itu peneliti ini juga diharapkan mampu menambah wawasan peneliti terkait Pengelolaan Dana dengan Perbedaan Tarif Air Bersih Antara Penduduk Lokal dan Pendatang. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian tentang Pengelolaan Dana PAMDes yang berbeda tarifnya sesuai dengan SOP yang berlaku di BUMDes Bhuana Utama. Selain itu, dapat menambah wawasan bagi peneliti untuk mengetahui perhitungan tarif tersebut baik itu penentuan pengamprahan air, pembayaran per m<sup>3</sup>, maupun kendala/denda.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta simpulan yang diperoleh dari penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut. 1) Bagi BUMDes Panji Sebagai Pengelola PAMDes Dasar dari pengelolaan Dana PAMDes yang memiliki 2 kriteria tarif air bersih antara penduduk lokal dan pendatang memiliki perbedaan yang cukup jauh harganya dan dalam rekening air pembayaran sudah tercatat pada beban yaitu Rp 2.500 dan Rp 5.000, juga tercatat denda telat membayar air untuk itu masyarakat panji sudah berusaha untuk menepati pembayaran untuk dapat pelayanan yang memadai. Sebagai sarana yang memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat Desa Panji baik itu dari penduduk lokal maupun pendatang, sudah seharusnya untuk dapat menentukan tarif air bersih harus disamaratakan baik itu penduduk lokal dan pendatang. Dalam hal ini untuk menghindari kesenjangan maupun persepsi masyarakat tentang ketidakseimbangannya perlakuan masyarakat yang sama menduduki lokasi di Desa Panji. Sehingga secara merata secara tidak langsung masyarakat dapat keadilan yang setara. Kemudian, untuk pencatatan direkening air masyarakat tidak sulit dan lebih efisien. Atas dasar tersebut adalah untuk kedepannya BUMDes dapat

melakukan pembenahan jika tidak dapat meratakan tarif air, yaitu dengan melakukan pembenahan dari kualitas air agar tidak ada protes karena air mati dari masyarakat setempat yang sudah membayar dengan tepat waktu. 2) Bagi pemerintah dalam hal ini PDAM Kabupaten Buleleng

Dasar dari keikutsertaan pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu PDAM dalam mengawasi pengelolaan PAMDes Panji Untuk dapat mengoptimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Desa Panji yang selama ini dari segi pelayanan belum optimal seperti kurangnya kesigapan teknisi dari pengelolaan PAMDes dalam menangani air mati yang dikarenakan pipa bocor dan air mati bisa sampai 1 hari yang membuat warga tidak dapat melakukan kegiatan rumah tangga seperti mencuci dan memasak padahal sudah membayar air dengan tepat waktu, pemerintah dan PDAM Kabupaten Buleleng harus memberikan pelatihan untuk pengelolaan air di Desa Panji kepada pengelola PAMDes terutama untuk teknisi air dan kesigapan BUMDes untuk memberikan dana cadangan kepada teknisi untuk sewaktu-waktu apabila air mati di malam hari. Selain itu untuk sanitasi airnya yang kadang air dikeluhkan warga kotor atau keruh, sesuai dengan SOP PDAM dapat memberikan instruksi bagaimana seharusnya dapat dilakukan pemberlakuan air bersih di PAMDes Panji ini, mungkin terdapat kekurangan dalam pemberian kaporit atau saringan air yang kurang. Setelah mendapatkan pelatihan dari BUMDes Panji diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas air bersih agar sesuai dengan pembayaran yang dilakukan masyarakat dan dapat meminimalisir kebocoran pipa maupun air yang mati. Kemudian pemerintah dapat memberikan masukan terhadap BUMDes Panji untuk tidak membedakan tarif air antara penduduk pendatang dan lokal tersebut guna untuk kesejahteraan bersama masyarakat Desa Panji.3) Bagi Peneliti Selanjutnya. Kepada peneliti selanjutnya, karena penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya meneliti pada pengelolaan dana dengan perbedaan tarif air bersih jadi peneliti

selanjutnya diharapkan dapat menambahkan dari sisi transparansi misalnya baik dana air maupun yang lainnya untuk mengetahui kemana arah uangnya dan tidak terjadi penyelewangan atau fraud. Selain itu diharapkan mampu menambah jumlah informan atau narasumber dan data dari pengelolaan dana PAMDes dengan perbedaan tarif harga air antara penduduk lokal dan pendatang. Selain itu, mencari lokasi penelitian di daerah lain dengan topik yang sama agar dapat membedakan penelitian di BUMDes Panji dengan lokasi yang lain. Hal tersebut dikarenakan agar mendapatkan perkembangan dari penelitian ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Badriyadi. 2012. Jurnal. *Pengelolaan Dana Pinjaman di Desa Sungai Raya*. Pontianak.
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. 2007. Malang: Universitas Brawijaya.
- Buku Pedoman Standar Operasional Prosedur Badan Usaha Milik Desa "Bhuana Utama"*. Panji.
- George R, Terry. 2005. *Principles of Management*. New York: Alexander Hamilton Institute.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Iqbal Hasan, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosida Karya.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ross, S.A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. 2010. *Corporate Finance 9th edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Susanti, Rina., dan Mildawati, Titik. 2014. *Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, hal. 1-18.

Tambunan, Tulus. 2011. *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang Kasus Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.